



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



3.1.1 Capaian Indikator Tujuan

Tujuan

Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

“.....Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....”

Indikator Tujuan

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

3.1.1.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,95	1,554	79,692	Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
						Pemberian insentif fiskal Pajak PKB dan Pajak BBN-KB berupa equivalen sama seperti pembayaran pajak pelaksanaan UU 28 tahun 2009	
						Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) bersama dengan OPD terkait antara lain Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja	
						Melakukan pengawasan terhadap pajak daerah berbasis mitigasi risiko	
						Pelaksanaan penagihan pajak daerah secara door to door service	
						Melaksanakan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.1.2 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.10
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	79,692	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana	64,29	Menunjang

				Pajak Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah		
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang

				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.2 Sasaran Strategis 1 (SS.1)

SS.1

Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal

".....*Revenue mobilization* merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah....."

IKSS.1

Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)

3.1.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.15
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	5,00	1,1187	22,374	Sinergi dan kolaborasi bersama OPD pemungut retribusi dalam menggali potensi PAD dari sektor Retribusi	
						Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuota akses data kependudukan	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Pembentukan Satgas OPAD PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.2.2 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.19
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja IKSS 1

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	22.374	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	65,96	Menunjang

				Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisis Pajak Daerah		
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.3 Sasaran Strategis 2 (SS.2)

SS.2

Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah

".....Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total

IKSS.2

Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

3.1.3.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.24
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,434	0,478	110,14	Memperkuat basis data pajak daerah dengan potensi kemampuan daerah	
						Meningkatkan intensifikasi pajak daerah dengan program peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah	
						Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan peningkatan pendaftaran wajib pajak baru untuk memberikan stimulus peningkatan investasi daerah	
						Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	
						Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah	
						Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)



3.1.3.2 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.28
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 2

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	110,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang

				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4 Sasaran Strategis 3 (SS.3)

SS.3

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

".....Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah"

IKSS.3

Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

3.1.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.34
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 3 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	1,26	(10,258)	(8,14)	Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	Penyesuaian dan harmonisasi kebijakan UU 1/2022 kedalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023
						Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota	Sinergi dan kolaborasi pendanaan dan kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
						Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota	Menyesuaikan dengan pencatatan akuntansi di SIPD
						Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan	Terus berupaya melakukan sosialisasi kebijakan pajak daerah secara massif
						Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi	Memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif untuk menstimulus pertumbuhan investasi di Sumatera Selatan
						Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah	Meningkatkan kinerja makroekonomi mendukung PSN untuk mendapatkan umpan balik berupa pemberian Dana Insentif Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4.2 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.38
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 3 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	(8,14)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan	98,01	Menunjang

				Daerah	Pajak Daerah		
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)



3.1.5 Sasaran Strategis 4 (SS.4)

SS.4

Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

".....Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (local tax ratio) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi....."

IKSS.4

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

3.1.5.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.43
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 4

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,25	0,909	72,72	Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota	Penguatan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
						Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah	Konsolidasi Bersama Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah
						Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah	Memberikan insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investasi daerah
						Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB	Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar patuh dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah
						Kendaraan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan	Kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi lainnya
						Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah	Melakukan pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk mengendalikan kebocoran penerimaan pajak daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.5.2 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.45
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 4 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	72,72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.6 Sasaran Strategis 5 (SS.5)

SS.5

**Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap
Pendapatan Daerah**

".....Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah....."

IKSS.5

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

3.1.6.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.53
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,45	45,835	94,60	Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	
						Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan	
						Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasive	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)



3.1.6.2 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.57
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Daerah	94,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang

				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.7 Sasaran Strategis 6 (SS.6)

SS.6

Meningkatnya Pendapatan Daerah

".....Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat"

IKSS.6

Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.1.7.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.63

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 6

O.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92,03	93,198	101,27	Melakukan update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat	
						Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah	
						Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya	
						Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu	
						<i>Cascading</i> pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.7.2 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.67
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 6

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	93,198	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.8 Sasaran Strategis 7 (SS.7)

SS.7

Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB

".....Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah"

IKSS.7

Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas

3.1.8.1.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.73
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 7

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,96	0,682	71,04	Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru	Diperlukan menciptakan peluang investasi daerah mendorong investor dengan memberikan insentif fiskal daerah
						Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan	Diperlukan Kerjasama dengan BUMDes atau Koperasi Merah Putih atau Posko Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan sampai ke wilayah pedesaan
						Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Mengadakan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Bersama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
						Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal	Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian atas kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
						Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat secara massif dan berkala waktu
						Belum optimalnya pelaksanaan atas rekomendasi dari KPK	Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025



3.1.8.1.2 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.77

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 7 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	71,04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak	61,40	Menunjang

					Daerah		
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

3.1.8.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.83
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,12	2,097	187,23	Memberikan program keringanan tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif berupa tarif Rp. 0	
						Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
						Penempelan stiker tanda lunas di kendaraan bermotor sebagai inovasi pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak	
						Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB, Opsen BBN-KB serta Opsen MBLB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan door to door service	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025



3.1.8.2.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.87
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	187,23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
				Perencanaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang

				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak	Jumlah Dokumen Keberatan	56,09	Menunjang

				Daerah	yang telah ditindaklanjuti		
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

